

Akuntabilitas Akuntansi Mendukung *Good Corporate Governance* Perusahaan Terbuka

Teddy Rochendi

tedirsm@gmail.com

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta

Slamet Soesanto

slametsoesanto@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma Jakarta

ABSTRACT

Good Corporate Governance - GCG is an indication of the establishment of the business actors' integrity, and the efficient use of company resources and meeting the expectations of stakeholders. As a GCG system, it regulates and controls the company to prevent misuse of resource and continue to encourage the company's growth to create added value for all parties. Public companies need good governance like other companies where the interests of the parties must be protected. The correlation between the application of GCG principles and accounting accountability is reflected in the internal control system in which accounting is a part. Accounting accountability is guaranteed if internal control practices are carried out properly as a form of GCG development in public companies.

Keywords: *Good Corporate Governance, Public Company*

ABSTRAK

Good Corporate Governance – GCG merupakan petunjuk menuju terbentuknya integritas pelaku usaha, dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sebagai sebuah sistem, GCG mengatur dan mengendalikan perusahaan guna mencegah penyalahgunaan sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan menciptakan nilai tambah untuk semua pihak. Perusahaan terbuka membutuhkan tata kelola yang baik seperti perusahaan lainnya dimana kepentingan para pihak harus dilindungi. Korelasi penerapan asas GCG dengan akuntabilitas akuntansi tercermin pada sistem pengendalian internal dimana akuntansi menjadi bagian di dalamnya. Akuntabilitas akuntansi terjamin jika praktik pengendalian internal pengelolaan perusahaan yang baik dijalankan sebagai wujud dari terbangunnya GCG di perusahaan terbuka.

Kata Kunci : *Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan Terbuka*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Isu *Corporate Governance* (CG) terus berlanjut mendapat perhatian yang tinggi menyusul serangkaian keruntuhan perusahaan yang terjadi di berbagai belahan dunia pada awal dekade ini. Fakta ini memberi pelajaran berharga. Respon atas fakta tersebut, negara-

negara anggota PBB melakukan berbagai tindakan guna memperkuat kerangka peraturan di bidang ini untuk memulihkan kepercayaan investor, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. (UNCTAD 2006:vii). Di Indonesia Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) telah terbentuk berpayung hukum pada Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor KEP/49/M.EKON/11/2004. Komite ini dibagi dua yaitu Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Perusahaan. Awal tahun 2007 Komite ini telah menyempurnakan pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG - Tata Kelola Perusahaan yang baik) dan merintis pembuatan pedoman *Good Public Governance* – *GPG (Combined Code)* sebagai sebuah terobosan dan bukti keseriusan pemerintah terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia.

Hakekat keputusan tersebut merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip GCG yang termuat di sejumlah undang-undang seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di tingkat internasional lembaga OECD (*Organization for Economic Cooperation dan Development*) juga mengeluarkan Prinsip GCG. Prinsip tersebut terkenal dengan akronim TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menggaransi kepastian pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang dan menghormati kepentingan pihak lain. Prinsip ini kemudian diadopsi di Indonesia. Publik menuntut adanya praktik bisnis yang bertanggungjawab, jujur dan bersih di lingkungan Perusahaan. Perlu segera diterapkannya GCG ini supaya tercipta iklim pasar dimana Perusahaan mampu masuk ke dalam ekosistem tata ekonomi moderen.

Keberhasilan penerapan GCG memerlukan situasi yang kondusif yang terbentuk atas tiga elemen yaitu dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Dunia usaha berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai pedoman dasar berbisnis, menjunjung nilai-nilai etika bisnis. Pemerintah sebagai regulator menegaskan tata aturan bisnis yang berkeadilan dan mensejahterakan. Masyarakat berperan sebagai pengguna

produk sekaligus pengawas praktik bisnis melalui lembaga swadaya organisasi non pemerintah.

Tingkat kesehatan Perusahaan tidak hanya dinilai dari keadaan nilai fisik infrastrukturnya. Akan tetapi lebih ditekankan pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur dari kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan kepada para pemegang saham dan *stakeholdernya*. Dengan sendirinya Perusahaan terdorong menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Sehingga dalam kondisi ekonomi apapun, Perusahaan yang sehat akan mampu bertahan menjaga kontinuitas perkembangan usaha dari waktu ke waktu memenuhi kewajiban finansial dan beroperasi dengan stabil. Oleh karena itu, perusahaan harus menggabungkan aturan dan prosedur tata kelola dengan insentif yang sesuai guna memastikan bahwa semua manajer dan karyawan—tidak hanya para manajer keuangan—bersatu untuk meningkatkan nilai Perusahaan. (Brealey, Myers, Allen 2017:1).

Implementasi *Good Corporate* di Perusahaan bisa diamati dari kinerja keuangan melalui analisis rasio seperti rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan ratio aktifitas. Hal ini didukung oleh pernyataan Claessens (2003), serta Erzi (2014) yang dikutip oleh (Nduru, Zae, Lase 2022:1240) mengidentifikasi empat area dimana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak positif *Corporate Governance* yang baik terhadap kinerja perusahaan, yaitu: a. sumber pembiayaan ekonomi mudah diakses b. biaya modal yang lebih rendah c. kinerja perusahaan terdorong menjadi lebih baik d. resiko tertular kesulitan keuangan diperkecil

Praktik moral hazard seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dapat dihentikan. *Corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (adanya pertanggungjawaban

dari setiap tindakan), dan lebih transparan. Terkonfirmasi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari bahwa perusahaan yang memperoleh skor GCG baik akan memiliki kinerja keuangan yang baik pula. (Sari 2018:25). Dengan demikian perusahaan secara operasional lebih efisien dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.

Permasalahan

a. Mengapa GCG menjadi urusan penting

GCG merupakan wahana proses menuju terbentuknya integritas pelaku usaha, dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan serta memenuhi harapan para pihak yang terkait. Pada umumnya negara-negara yang terkena krisis ekonomi terparah adalah negara-negara yang sistem tata kelolanya masih lemah, antara lain dalam bidang akuntansi yang implementasinya sering tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ditentukan di negara tersebut, sistem manajemen yang masih berdasarkan koneksi atau nepotisme tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme. (Alamsyah 2021:1). Hal ini menunjukkan kualitas dan pola hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham dan juga pemangku kepentingan, tertangkap di dalam implementasi GCG. Prinsip GCG diterapkan sebagai sarana untuk mengukur kinerja perusahaan dan menopang utama pemenuhan kepentingan para pemegang saham guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menjamin keberlangsungan usaha dari perusahaan itu sendiri. GCG menjadi urusan penting akan tampak jelas ketika terjadi keterlambatan publikasi laporan keuangan. Tertundanya penerbitan laporan keuangan acapkali disebut sebagai *audit delay* yaitu suatu kondisi tertundanya proses audit karena laporan keuangan terlambat disampaikan kepada audit eksternal untuk diperiksa dan diberikan opini. Tertundanya ini biasanya disebabkan proses internal penyajian data laporan

keuangan akibat dari tata kelola internal perusahaan yang tidak baik. Bila laporan keuangan yang dipublikasikan mundur, maka menjadi ancaman *potensial loss* bagi para pengguna laporan keuangan. Kreditur dan pemegang saham yang mengandalkan referensi dari laporan keuangan kehilangan peluang investasi ataupun momentum divestasi saham. Selain itu kerugian immateriil yang tidak sedikit berupa buruknya citra perusahaan dan menurunnya realibilitas kantor auditornya.

b. Pengendalian Internal penjaga akuntabilitas akuntansi.

Secara umum dipahami bahwa akuntansi memberikan informasi untuk memandu keputusan yang dibuat oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi perusahaan. Penilaian kesehatan perusahaan ditinjau dari tiga aspek yaitu pertama aspek keuangan menggunakan ukuran rasio-rasio keuangan, Laporan keuangan lengkap berfungsi sebagai sinar-X dari kesehatan keuangan bisnis. Dengan mengevaluasi semua laporan keuangan, seseorang dengan pengetahuan keuangan dapat menentukan kesehatan bisnis secara keseluruhan. (White etall 2022:9). Kedua aspek operasional menggunakan ukuran kegiatan operasional perusahaan yang paling dominan. Ketiga aspek administrasi menggunakan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan program *Corporate Social Responsibility*.

Korelasi penerapan asas GCG dengan akuntabilitas akuntansi tercermin pada sistim pengendalian internal dimana akuntansi menjadi bagian di dalamnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia terdapat tiga kerangka pendekatan yang umum digunakan untuk mengembangkan kerangka pengendalian yaitu: 1. COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) menekankan pada tiga aspek penting yakni a. sasaran bisnis, b. sumber daya TI, c. proses TI. 2. COSO-*Internal Control Integrated Framework* terdiri dari lima komponen utama yaitu : a. lingkungan pengendalian b. aktifitas

pengendalian. c. penilaian risiko. d. informasi dan komunikasi e. monitoring.

3. *COSO-Enterprise Risk Management* terdiri dari a. lingkungan internal b. penetapan sasaran organisasi c. identifikasi risiko d. penilaian risiko e. aktifitas pengendalian f. informasi dan berkomunikasi g. pemantauan (IAI 2015:49-59)

Memperhatikan pentingnya fungsi pengendalian internal sebagai penjaga gerbang utama yang bertugas melindungi integritas laporan keuangan, perusahaan besar sangat ketat mengatur pelaksanaannya. Tata kelola pengendalian internal yang baik mampu membantu memblokir godaan untuk mengelabui meningkatkan harga saham dengan cara ilegal dan tidak etis.

Tujuan

Paper ini bertujuan menelusuri sejauhmana dimensi yang dilalui CG menjadi penting dipraktikkan di perusahaan dan mengidentifikasi peran akuntansi membangun area akuntabilitas sebagai bagian dari GCG melalui tinjauan literatur di mana diperlukan lebih banyak studi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi dan Akuntabilitas

Secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan, meringkas, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi untuk memungkinkan pengguna informasi tersebut membuat keputusan. Hal ini melibatkan penyediaan informasi tentang aspek kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam maupun di luar perusahaan. Menurut (White etall 2021:19) definisi akuntansi telah berubah dari waktu ke waktu. Secara teknis definisi akuntansi di masa lalu murni tentang metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas bisnis. Sehingga yang tergambar pada diri seorang akuntan adalah seseorang yang berperan menerapkan metode perekaman praktik transaksi bisnis. Akuntan biasanya mengklasifikasikan pusat pertanggungjawaban menjadi salah satu dari empat jenis: a. biaya, b.

pendapatan c. laba d. investasi.(Atkinson etall 2012:494). Namun seiring kemajuan teknologi komputasi dan pentingnya aspek moralitas, pengertian akuntansi bergerak menyesuaikan ragam model transaksinya.

Akuntansi membantu bisnis memastikan akuntabilitas karena akuntansi membantu menjelaskan bagaimana bisnis telah mengalokasikan sumber dayanya yang berupa kas dan aset. Dengan demikian peran akuntan juga berubah. Dalam kaitan inilah berdasar penelitian, pengalaman dan refleksi keilmuan tiga orang profesor Garry Carnegie, Lee Parker dan Eva Tsahuridu mengusulkan pembaharuan definisi akuntansi sebagai praktik teknis, sosial, dan moral yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan akuntabilitas yang tepat kepada pemangku kepentingan guna memungkinkan berkembangnya organisasi, manusia, dan alam. (White etall 2021:7). Oleh karena itu memahami akuntansi akan menjadi sangat penting bagi manajemen menghasilkan keputusan terbaik, dan juga dapat membantu pemilik mengidentifikasi masalah sebelum masalah tersebut menjadi tidak teratasi. Sehingga dengan praktek akuntansi tata kelola perusahaan dapat dinilai seberapa kuatnya perusahaan konsisten di jalurnya dalam mencapai tujuan

Corporate Governance

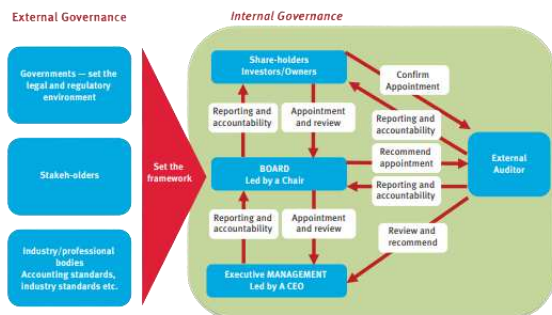
Lembaga besar dunia seperti Komite Cadbury (1992) mendefinisikan CG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Mengarahkan dan mengendalikan perusahaan merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dengan menetapkan struktur, aturan, dan prosedur untuk pengambilan keputusan. (Vasant, 2020:4). Pada intinya mengatur kewenangan dan kewajiban pemilik, pengelola, dan pihak terkait lainnya.

Menurut Price Waterhouse Coopers (2000), CG terkait dengan keputusan yang efektif. Berbagai proses yang dilalui membentuk kultur organisasi yang di dalamnya hidup nilai-nilai yang melekat pada sistem diwujudkan menjadi kebijakan serta hirarki wewenang dan tanggung jawab yang tercermin di struktur organisasinya. Tujuannya mengendalikan risiko, melaksanakan tanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Sedangkan Claessens

(2003: 4) menyatakan bahwa pengertian *CG* dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu :

- Pertama menitikberatkan pada perilaku perusahaan yang meliputi bagaimana perusahaan memperlakukan pemegang saham dan para pemangku kepentingan serta menetapkan struktur pembiayaan.
- Kedua menitik beratkan pada kerangka normatif yang meliputi aturan dan sistem hukum dan peradilan yang berpengaruh pada operasional perusahaan.

Verhezen dan Abeng (2020) membagi *governance* menjadi dua yaitu *External Governance* berperan sebagai penyusun kerangka kerja, terdiri dari unsur a. pemerintah yang bertugas menyusun aturan dan hukum, b. pemangku kepentingan, c. industri/lembaga profesional yang menyusun standar akuntansi standar industri dll. Dan *Internal Governance* yang merupakan elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan seperti a. pemegang saham, investor/pemilik, b. dewan direksi c. eksekutif manajemen yang dipimpin seorang CEO. Pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen senior membentuk inti ekosistem tata kelola. (Vasant, 2020:61). Hasil kerja ketiga elemen tersebut akan diperiksa dan dimintakan opini kepada auditor eksternal.



Gambar *Governance Today*
Sumber: Verhezen dan Abeng
(2020 :8)

Badan Urusan Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD-United Nations on Conference Trade and Development) menerbitkan Pedoman Pengungkapan *Good Practices In Corporate Governance Disclosure*. Berisi lima elemen penting yaitu 1. Pengungkapan Keuangan 2. Pengungkapan Non Keuangan 3

Rapat-rapat 4. Media yang digunakan dan Waktu Pengungkapan 5. Kepatuhan pada aturan yang berlaku. Pengungkapan itu harus jelas, ringkas, tepat dan diatur dengan prinsip “substansi melebihi bentuk” UNCTAD (2006 : 3-31).

Tujuan Governance

Corporate Governance mencakup hubungan antara pemangku kepentingan dengan tujuan pengelolaan perusahaan itu sendiri. Tujuan *governance* yaitu untuk menjaga mereka yang mengatur kepentingan orang lain supaya tetap selalu bisa dipercaya. (Vasant, 2020:3). Dalam tata kelola perusahaan, ada hubungan fidusia antara pemegang saham dan manajemen perusahaan (Vasant, 2020:16). Terlihat jelas semangat menjunjung tinggi nilai moralitas dalam pengelolaan Perusahaan, karena moralitas dan akuntansi saling berhubungan (Carnegie, Parker dan Tsahuridu 2021).

Perusahaan Terbuka

Dari aspek legalitas, perusahaan terbuka merupakan badan hukum yang dimiliki oleh pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum, perusahaan dapat membuat kontrak, menjalankan bisnis, meminjam atau meminjamkan uang, dan menuntut atau dituntut. Penyandang status terbuka lebih mudah melakukan akuisisi ataupun merger melalui saham. Kondisi valuasi perusahaan meningkat akan meningkatkan harga sahamnya (Klik Pajak 2023). Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, yang berarti bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi untuk hutang Perusahaan. (UU No 40/2007 Ps. Pasal 3 ayat 1). Pertimbangan utama perusahaan yang semula tertutup menawarkan sahamnya ke publik yaitu ketersediaan sumber pendanaan yang murah di pasar modal, selain itu juga sebagai pilihan strategi bisnis guna memperbaiki tata kelola bisnisnya supaya berkembang ke skala dunia. Perusahaan terbuka berkepentingan meningkatkan aspek GCG, menyiapkan laporan keuangan lebih akuntabel yang mudah diakses oleh publik.

Peran para pelaku dalam *Corporate Governance*

Pemegang Saham

Pemegang saham bisa individu atau organisasi. Status sebagai pemegang saham dimulai sejak awal waktu saham dibeli dan berakhir pada saat saham dijual. Pemegang saham adalah penerima manfaat utama dari upaya tata kelola yang baik. Merekalah yang kepentingan ekonominya dilindungi. Fokus tata kelola perusahaan yaitu menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Sebagai badan hukum terpisah, perusahaan masih memiliki ikatan dengan para pemegang saham. Pemilik saham memiliki hak sisa dalam bisnis dan dengan demikian mengambil risiko bisnis, meskipun tanggung jawab mereka terbatas pada apa yang mereka investasikan di perusahaan. Ikatan pemilik dengan perusahaan pada hakekatnya adalah suatu ikatan dengan manajemennya.

Dewan Direksi

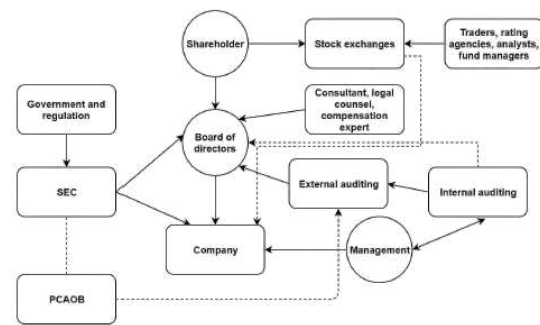
Tanggung jawab atas tata kelola perusahaan hampir seluruhnya bergantung pada direksi, yang merupakan perwakilan terpilih dari pemegang saham. Masa jabatan anggota dewan direksi setiap tahun, meskipun beberapa perusahaan memiliki siklus multi-tahun dan dapat dipilih kembali jika memenuhi syarat. Setiap direktur secara kolektif, diberi tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan manajemen dengan maksud memaksimalkan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan.

Eksekutif Senior

Nasib perusahaan dibentuk oleh para pemimpinnya, para eksekutif senior. Sejak manajemen membuat keputusan dan menindaklanjutinya atas nama perusahaan, manajemen mewakili perusahaan. Hasilnya adalah upaya dewan untuk memerintah diarahkan kepada manajemen senior sebagai agen perusahaan.

Karena pemisahan pengambil risiko (pemegang saham) dari perusahaan, tata kelola yang baik dimulai dengan pengungkapan yang memadai dan tepat waktu oleh manajemen. Setiap informasi yang diyakini berdampak material pada keputusan pemegang saham untuk tetap bertahan dalam perusahaan harus dikomunikasikan secara tepat waktu dan transparan.

Peran pelaku di dalam CG, digambarkan ke dalam diagram berikut ini:



Gambar : Peran para pelaku dalam Corporate Governance

Sumber : Vasant (2020 : 62)

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode kualitatif melalui *Desk Research* termasuk *Desk research Online*. Data secara *online* di internet dipilih secara spesifik supaya hasilnya menjanjikan dan relevan. Melakukan penelusuran informasi spesifik tersebut dari situs industri, lembaga internasional, lembaga pemerintah, swasta, media massa di dalam negeri dan luar negeri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui bagaimana akuntansi berperan dalam penciptaan GCG di sektor publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep akuntabilitas diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Menilai kinerja perusahaan belum cukup hanya dilihat dari perolehan labanya saja. Namun perlu dinilai berapa *Return on Investment* (ROI), *Residual Income* (RI), dan *Economic Value Added* (EVA). Informasi yang tersaji perlu di dijamin akuntabilitasnya sebagai referensi pengambilan keputusan. Dari sumber literatur yang dikaji terkesan ada kesepakatan umum tentang ciri-ciri informasi akuntansi yang secara kualitatif berguna untuk pengambilan keputusan, yaitu jika informasi tersebut : relevan, andal, keterbandingan, dapat diverifikasi, dimengerti, tepat waktu.

Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur guna melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Sebagai wujud dari

akuntabilitas, perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh perusahaan.

Sementara itu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bervariasi tergantung pada bentuk badan hukum dan ukuran perusahaan. Dalam bisnis perseorangan, dimana pemilik sekaligus merangkap sebagai karyawan bertanggung jawab atas pengendalian internal dari tindakannya sendiri. Dalam skala bisnis yang lebih besar dimana pemilik dan manajer yang dipekerjakan – baik pemilik maupun manajer bertanggung jawab atas kepastian penerapan sistem pengendalian internal yang memadai. Sementara itu untuk perusahaan terbuka – maka pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola termasuk Direksi (yang merupakan perwakilan dari pemilik/pemegang saham) dan Manajemen – *Chief Executive Officer, Chief Financial Officer*, dan banyak lagi pejabat lainnya. Dewan direksi untuk perusahaan publik juga akan memiliki sub-dewan yang lebih kecil yang disebut "Komite" - komite umum termasuk Komite Audit (bertanggung jawab atas pelaporan eksternal dan berhubungan dengan auditor eksternal) dan Komite Risiko dan Tata Kelola Kepatuhan (bertanggung jawab secara eksplisit untuk mengawasi pengendalian internal). Sebagai ilustrasi di Amerika Serikat pengawasan terhadap pengendalian internal diperketat melalui serangkaian undang-undang Sarbanes Oxley Act of 2002 khususnya seksi 404 (SOX) yang mewajibkan para auditor eksternal supaya melaporkan kualitas dari pengendalian internal perusahaan terbuka. Hal ini dipicu adanya mega skandal Enron dan WorldCom yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya investor pada laporan keuangan dan audit laporan keuangan. Aturan ini berlaku juga untuk anak perusahaan Amerika di luar negeri. Regulator di Indonesia belum mengadopsi sepenuhnya dari SOX ini karena berbagai kendala (Evandini dan Hiola 2012) seperti a. pernyataan bahwa direksi bertanggungjawab terhadap pengendalian internal, b. pernyataan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, c. kemampuan dan kesanggupan KAP memberikan attestasi atas pernyataan direksi terkait kepatuhan dan pengendalian internal d. aturan yang melarang KAP melakukan audit bersamaan juga memberikan jasa konsultasi non-audit lainnya di klien yang

sama e. sanksi hukuman bagi pelanggar yang belum membuat efek jera.

Penerapan governance berkorelasi signifikan dengan harga saham dimana di dalam perusahaan yang baik pengelolaannya memiliki harga saham yang tinggi demikian juga sebaliknya. (Malik 2012). Dampak positifnya yaitu deviden juga akan meningkat, demikian juga dengan penerimaan negara dari faktor pajak yang harus dibayar perusahaan.

Manajemen bisnis bertanggungjawab mengkaitkan sistem akuntansi dengan fungsi-fungsi lainnya serta memastikan komunikasi terjalin baik antar unit kerja, pelanggan, pemasok, penyedia layanan keuangan maupun pengguna laporan keuangan eksternal lainnya. Perusahaan tidak ragu berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar membangun sistem perencanaan sumber daya perusahaan - *Enterprise Resource Planning*, yaitu sistem komputer yang kompleks dan canggih yang mengkoordinasikan kegiatan unit-unit organisasi.

Sebagai contoh sebuah transaksi penjualan atas satu macam item barang dagangan akan tercatat di sistem penjualan, jika pembayaran dilakukan dengan kartu debit/kredit maka akan otomatis terhubung dengan bank atau lembaga penyedia transaksi keuangan lainnya. Ketika barang dagangan laku, sistem inventori akan mencatat dan akan menginformasikan ke bagian pengadaan barang dagangan dan segera melakukan pemesanan barang dagangan dari pemasok. Sementara itu bagian pemasaran dengan jeli memberikan masukan barang apa saja yang sedang digemari konsumen. Perusahaan juga akan dapat melihat kondisi terkini atas persediaan produk barang dagangan guna menjamin kemudahan konsumen berbelanja. Integrasi sistem informasi antar unit kerja dengan sistem informasi akuntansi memungkinkan manajemen cepat menentukan sikap dan tepat mengambil keputusan.

Dari ilustrasi transaksi di atas banyak sistem terhubung melalui teknologi yang menggerakkan keputusan yang dibuat oleh banyak pemangku kepentingan di dalam dan di luar bisnis, pada posisi ini peran krusial pengendalian internal diperlukan guna memastikan aliran informasi dan menjaga integritas pelaksana. Sistem pengendalian

internal juga membantu semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan pemahaman tentang bisnis dan memberikan jaminan bahwa semua aset digunakan secara efisien dan akurat. Pengendalian internal juga menjadi andalan bagi pemilik dan pemegang saham meminta manajemen bertanggung jawab atas tindakan mereka.

KESIMPULAN

Setiap Perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. CG merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Sebagai sebuah sistem GCG mengatur dan mengendalikan perusahaan guna mencegah penyalahgunaan sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan menciptakan nilai tambah untuk semua pihak. Keberadaan tata kelola perusahaan memastikan kelancaran operasi dan karyawan yakin akan apa yang harus mereka lakukan.

Sebagai pengukur kinerja keuangan akuntansi menyediakan mekanisme dimana perusahaan terbuka dapat menginformasikan pelaporan keuangan kepada pemangku kepentingan tentang sejauh mana tindakan organisasi dianggap benar-benar telah bertanggung jawab. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan semua informasi kinerja perusahaan, secara transparan dan akurat. Pada titik ini GCG merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang.

GCG bertujuan supaya keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan tercapai, menjamin kelangsungan eksistensinya dan bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang terdampak operasi bisnis. GCG yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi manajemen perusahaan untuk mengejar tujuan guna kepentingan

perusahaan dan pemegang sahamnya serta memfasilitasi pengawasan yang efektif.

Akuntabilitas akuntansi terjamin jika praktik pengendalian internal pengelolaan perusahaan yang baik dijalankan sebagai wujud dari terbangunnya GCG di perusahaan terbuka. Tata kelola perusahaan adalah sebuah proses, bukan sebuah keadaan. (Adrian Codbury dalam Claessens 2003:vii). Oleh karena itu harus terus menerus dievaluasi penerapannya disempurnakan konsepnya.

REFERENSI

- Alamsyah, Muhammad Iqbal S.E., M.M (2021) AKC036 – Tata Kelola Perusahaan – Modul-Sesi 2 Bab - 2 Konsep Peranan Tata Kelola Perusahaan <https://www.studocu.com/id/document/universitas-telkom/intermediate-financial-accounting-2/akc036-tata-kelola-perusahaan-modul-sesi-2/16597000> diakses tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.35 WIB.
- Atkinson,Anthony A., Kaplan,Robert S., Matsumura,Ella Mae.,Young, S. Mark., Mukherjee, Abhik Kr.(2012) Management Accounting Information for Decision-Making and Strategy Execution 6th Edition, Pearson Education Limited, Essex England
- Brealey, Richard A. Myers, Stewart C. Allen, Franklin (2017) *Principles Of Corporate Finance*, Twelfth Edition, McGraw-Hill Education, New York
- Carnegie, Gary., Parker, Lee., Tsahuridu, Eva. (2021). It's 2020: What is Accounting Today?, *Australian Accounting Review*, No.96 Vol. 31, 65-73. doi: [10.1111/auar.12325](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/auar.12325) <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/auar.12325> diakses tanggal 22 Pebruari 2023
- Claessens, Stijn, Corporate Governance and Development (October 2003). SSRN: <https://ssrn.com/abstract=642721> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.642721> atau https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=642721 diakses tanggal 24 Pebruari 2023
- Edvandini, Levinda dan Hiola, Yustina 2012 Akuntan Publik Dan Regulator Atas Keandalan Sistem Pelaporan Keuangan Studi Kasus : Penerapan Sarbanes Oxley di Indonesia Pendidikan Profesi

- Akuntansi Universitas Brawijaya
<https://www.termpaperwarehouse.com/essay-on/Penerapan-Sarbanes-Oxley-Di-Indonesia/57225> diakses tanggal 23 Pebruari 2023
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2014). *Accountability, Social Responsibility and Sustainability*. Harlow, UK: Pearson
<http://eprints.ums.ac.id/36388/5/BAB%20I.pdf>
- IAI (2015) Modul CA-Sistim Informasi dan Pengendalian Internal
<http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/sip/files/basic-html/page51.html> diakses tanggal 05 Maret 2023 Pukul 15.09
- Jerotich, Ruth CPA, FMVA 2021 Six Benefits of Good Corporate Governance in Business
<https://www.linkedin.com/pulse/six-benefits-good-corporate-governance-business-ruth-jerotich> diakses tanggal 26 Pebruari 2023
- Klikpajak (2023) Keuntungan Perpajakan Jadi Perusahaan Go Public
<https://klikpajak.id/blog/perusahaan-tbk/> diakses tanggal 7 Maret 2023 Pukul 11.10
- Malik, Saif Ullah (2012) Relationship between corporate governance and stock prices : Evidence form KSE – 30 Index Companies. International Journal of Business and Social Science Vol.3, No.4, [Special Issue - February 2012]
<https://core.ac.uk/download/pdf/211606555.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2023 Pukul 11.11
- Ndruru,Serius., Zai,Kurniawan Sarototonafo., Lase,Natalia Kristiani (2022) Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Upaya Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan Di Pt. Liquid Kencana Abadi Jurnal EMBA Vol. 10 No. 4 Oktober 2022, Hal. 1239-1243 Universitas Samratulangi, FEB
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43949/40191> DOI: <https://doi.org/10.35794/emba.v10i4.43949> diakses 03 Maret 2023 Pukul 09.43 WIB.
- OECD (2014), *Risk Management and Corporate Governance*, Corporate Governance, OECD Publishing.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264208636-en> diakses tanggal 05 Maret 2023
- Raval, Vasant (2020) *Corporate Governance - A Pragmatic Guide for Auditors, Directors, Investors, and Accountants*, CRC Press, Boca, Raton
- Sari,Maya (2018) Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Prosiding: *The National Conferences Management and Business* (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital” ISSN: 2621 – 1572
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9880/2.%20Maya%20Sari.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses tanggal 3 Maret 2023 Pukul 10.27 WIB.
- Sarokin, David., Schulkin, Jay (2020)- *The Corporation_ Its History and Future*- Cambridge Scholars Publishing
- Schandl,Annette., Foster,Philip L., CROWE (2019) COSO-Internal-Control-Integrated-Framework
- UNCTAD (2006) United Nations Conference on Trade and Development - Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure United Nations Publication Sales No. E.06.II.D.12 ISBN 92-1-112704-1 New York and Geneva
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Verhezen,Peter., Abeng,Tanri (2020) - *The Boardroom_ A Guide to Effective Leadership and Good Corporate Governance in Southeast Asia*-De Gruyter, Berlin/Boston.
- White, Amanda., Franklin, Mitchell., Graybeal, Patty., Cooper, Dixon., CDU Business School (2022), *Accounting and Accountability*, University Of Technology Sydney